# The Papua Monitor: Q1/2025

Update April 2025: Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua[1] , Indonesia - Meliputi Peristiwa dari 1 Januari hingga 31 Maret 2025 (Kuartal Pertama 2025)

| Pelanggaran | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| **Penyiksaan** | 2 korban dalam 2 kasus | 11 korban dalam 3 kasus | 9 korban dalam 7 kasus | 23 korban dalam 12 kasus |
| **Kebebasan berekspresi** | 10 korban dalam 2 kasus | 18 korban dalam 8 kasus | 2 korban dalam 2 kasus | Lebih dari 3 korban dalam 3 kasus |
| **Pembunuhan** | 3 korban dalam 3 kasus | 6 korban dalam 4 kasus | 7 korban dalam 6 kasus | 6 korban dalam 6 kasus |
| **Penghilangan** | 1 korban dalam 1 kasus | - | 2 korban dalam 2 kasus | - |
| **Intimidasi** | 1 korban dalam 1 kasus | 13 korban dalam 5 kasus | 2 korban dalam 2 kasus | Puluhan korban dalam 3 kasus |
| **Kriminalisasi** | 1 korban dalam 1 kasus | - | - | - |
| **Penganiyaiaan** | 34 korban dalam 7 kasus | 54 korban dalam 13 kasus | Lebih dari 38 korban dalam 12 kasus | Lebih dari 11 korban dalam 8 |
| **Hak-hak budaya** | Puluhan korban dalam 4 kasus | Puluhan korban dalam 3 kasus | Puluhan korban dalam 1 kasus | Puluhan korban dalam 3 kasus |
| **Penahanan sewenang-wenang** | 93 korban dalam 7 kasus | 233 korban dalam 9 kasus | 65 korban dalam 9 kasus | 81 korban dalam 11 kasus |
| **Kebebasan berkumpul** | Lebih dari 107 korban dalam 6 kasus | Lebih dari 279 korban dalam 13 kasus | Lebih dari 87 korban dalam 6 kasus | Lebih dari 68 korban dalam 7 kasus |
| TOTAL | **Lebih dari 132 korban dalam 19 kasus** | **Lebih dari 313 korban dalam 33 kasus** | **Lebih dari 122 korban dalam 23 kasus** | **Lebih dari 117 korban dalam 29 kasus** |

*Tabel 1: Data pelanggaran dan korban per kuartal. Simbol "+" yang mengikuti angka menunjukkan jumlah tertentu (angka yang diberikan) ditambah dengan jumlah tambahan yang kurang tepat (misalnya, puluhan, beberapa). Setiap kolom adalah set independen, yang mencerminkan kemungkinan beberapa pelanggaran per korban atau kasus. Total mewakili jumlah unik per kolom, bukan jumlah keseluruhan.*

# Ringkasan

## Hak Asasi Manusia

[1] Istilah Tanah Papua, yang juga kadang-kadang disebut sebagai West Papua, Papua atau Papua Nugini Barat merujuk pada bagian barat kepulauan Papua Nugini dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari Indonesia sejak tahun 1969. Wilayah ini terdiri dari provinsi administratif Indonesia yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Konflik mengenai status politik Tanah Papua yang belum terselesaikan terus menimbulkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat.

Antara Januari dan Maret 2025, situasi hak asasi manusia di Tanah Papua ditandai dengan serangkaian operasi aparat keamanan di berbagai kabupaten di pegunungan tengah, beberapa di antaranya disertai dengan pengeboman dari udara dekat pemukiman sipil. Meningkatnya kehadiran militer dan operasi kontra-pemberontakan menyebabkan pengungsian internal baru di daerah-daerah yang terkena dampak (lihat bagian konflik) dan juga menghasilkan jumlah kasus penyiksaan yang luar biasa tinggi selama periode pelaporan ini (lihat tabel di atas). Kekerasan bersenjata meningkat secara signifikan di Intan Jaya, di mana militer Indonesia (TNI) dilaporkan melakukan pengeboman dekat pemukiman warga sipil sebagai tanggapan atas serangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Sementara itu, komunitas hak asasi manusia di Tanah Papua telah kehilangan salah satu pembela hak asasi manusia yang paling senior dan terkemuka. Bapak Yones Douw meninggal dunia di rumahnya di Nabire pada 2 Februari 2025.

Selama kunjungan ke Indonesia pada bulan Maret 2025, Sekretaris Jenderal Amnesty International, Ibu Agnes Callamard, menyatakan keprihatinannya mengenai impunitas yang mengakar di Indonesia, khususnya di Tanah Papua, di mana para pelaku militer dan polisi secara rutin lolos dari tuntutan atas pembunuhan di luar hkum, penyiksaan, dan penindasan terhadap ruang-ruang sipil, karena institusi penegak hukum gagal memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia. Sepanjang periode pelaporan, pengadilan membebaskan para pelaku dengan mengabaikan kesaksian dan bukti-bukti yang memberatkan, dan proses penegakan hukum dalam berbagai kasus eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, dan serangan bom molotov terhadap kantor media Jubi mengalami penundaan yang signifikan dan kurangnya transparansi. Kelompok-kelompok solidaritas dan aktivis hak asasi manusia yang mengalami intimidasi, dan serangan fisik keadilan dalam kasus-kasus tersebut menghadapi penindasan.

Di beberapa kabupaten di Tanah Papua, layanan pendidikan mengalami gangguan yang parah, dengan ribuan siswa tidak dapat mengakses pendidikan dasar. Laporan terbaru dari beberapa lokasi menyoroti pola yang mengkhawatirkan dari sekolah-sekolah yang terbengkalai, guru-guru yang tidak hadir, dan murid-murid yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Kasus-kasus yang didokumentasikan selama periode pelaporan menunjukkan bahwa kegagalan struktural juga mempengaruhi sistem kesehatan di Tanah Papua. Meskipun kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan kesesuaian layanan kesehatan merupakan masalah yang sudah lama terjadi di wilayah ini, kasus-kasus yang terjadi baru-baru ini juga mengindikasikan adanya penurunan kualitas layanan kesehatan di daerah perkotaan. Di rumah sakit umum di Nabire, lebih dari 200 pekerja kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, termasuk dokter, perawat, dan bidan, melakukan mogok kerja, menuntut insentif yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan sejak akhir tahun 2024.

Sementara itu, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Tanah Papua terus berlanjut. Kasus-kasus pertambangan memicu konflik dan merusak lingkungan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat. Proyek raksasa pertanian yang dijalankan oleh pemerintah telah menjadi ancaman besar bagi keberadaan banyak suku asli di Tanah Papua. Contoh yang paling menonjol adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, di mana pemerintah telah merencanakan untuk mengembangkan padi dan tebu di atas 2 juta hektar tanah adat tanpa persetujuan atas dasar informasi yang didahului tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat adat. Masyarakat adat Marind Anim di Provinsi Papua Selatan, bersama dengan ratusan aktivis masyarakat adat dari seluruh Indonesia, telah mengeluarkan penolakan keras terhadap PSN yang mengancam tanah, budaya, dan mata pencaharian mereka. Pelaksanaan PSN diserahkan kepada TNI dan dimulai bulan September 2024. Sangat memprihatinkan bahwa militer dan polisi terus merangsek masuk ke ranah sipil, terutama di bidang pertanian. Dalam sebuah langkah kontroversial, Kepolisian Republik Indonesia

(Polri) meluncurkan proyek penanaman jagung berskala besar yang menargetkan 1,7 juta hektar lahan di seluruh Indonesia, termasuk di Jayapura.

## Konflik

Per 1 April 2025, lebih dari 86.886 orang di Tanah Papua masih menjadi pengungsi internal akibat konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan TPNPB. HRM mendokumentasikan 24 serangan dan bentrokan bersenjata sepanjang kuartal pertama 2025. Jumlah pengungsi kembali meningkat setelah pasukan keamanan meningkatkan operasi di Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang, dan Puncak pada bulan Januari dan Februari 2025.

Permusuhan di Intan Jaya meningkat secara signifikan setelah para pejuang TPNPB menyerang konvoi militer di desa Janamba pada tanggal 27 Maret 2025. Setelah itu, TNI melancarkan operasi kontra-pemberontakan di beberapa kabupaten dan menargetkan sasaran yang diduga sebagai markas TPNPB. Bukti yang dikumpulkan oleh para pembela hak asasi manusia setempat menunjukkan bahwa daerah-daerah dekat pemukiman sipil dibombardir tanpa pandang bulu, yang mengakibatkan pengungsian yang meluas dan setidaknya satu warga sipil tewas. Pada tanggal 23 Maret 2025, anggota TPNPB menyerang guru dan petugas kesehatan di Desa Angguruk, Kabupaten Yahukimo, menewaskan satu petugas pendidikan dan menyebabkan tujuh petugas lainnya terluka.

Pengerahan pasukan ke daerah konflik di pegunungan tengah merupakan bagian dari taktik tempur baru TNI di Tanah Papua. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan pada akhir Januari 2025 bahwa ia akan melakukan perubahan mendasar pada doktrin perang, yang memungkinkan TNI untuk lebih adaptif dan mampu menghadapi perang gerilya di Tanah Papua. Jenderal Subiyanto menjelaskan bahwa perubahan tersebut akan mencakup penyesuaian teknis, meningkatkan kemampuan taktis prajurit, dan memodernisasi peralatan tempur.

Periode antara Januari dan Maret 2025 ditandai dengan jumlah korban jiwa yang tinggi di kalangan aparat keamanan dan warga sipil. Sepuluh anggota pasukan keamanan dibunuh, dan satu orang terluka selama periode ini. Sebaliknya, TPNPB dilaporkan tidak kehilangan kombatan selama permusuhan. Permusuhan bersenjata antara pihak-pihak yang bertikai juga berdampak pada warga sipil, dengan empat warga sipil terbunuh dan delapan terluka oleh TPNPB, dan dua orang terbunuh dan empat terluka oleh anggota pasukan keamanan dalam bentrokan bersenjata atau operasi keamanan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengutuk penggunaan fasilitas umum seperti sekolah, kantor distrik, dan gereja sebagai pos keamanan oleh TNI dan polisi di Tanah Papua, dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut para pengamat HAM setempat, TNI terus menduduki fasilitas publik di Kabupaten Maybrat, Nduga, dan Pegunungan Bintang.

## Perkembangan politik

Presiden Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, meluncurkan Proyek 'Makanan Bergizi Gratis' (MBG) di seluruh Indonesia, dengan peluncuran berskala besar yang dijadwalkan pada bulan Februari 2025. Di Tanah Papua, ribuan siswa di Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Jayapura, Paniai, Deiyai, dan Nabire melakukan demo damai menentang program tersebut, mengkritik keterlibatan militer dan menuntut pendidikan gratis,

bukannya makan siang yang gratis. Aparat keamanan dengan keras menindas aksi protes di Wamena, Yalimo, Timika, Jayapura, Sentani, dan Nabire, dengan menggunakan gas air mata, pemukulan, penangkapan massal, dan intimidasi terhadap murid-murid sekolah.

Pada tanggal 10 Maret 2025, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan daftar lembaga pemerintah yang secara hukum berwenang untuk mengangkat prajurit TNI yang masih aktif untuk menduduki jabatan sipil, berdasarkan Pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Lembaga-lembaga ini merupakan lembaga-lembaga strategis, termasuk Mahkamah Agung. Menurut organisasi hak asasi manusia 'Imparsial', sekitar 2.500 prajurit TNI aktif saat ini menduduki jabatan sipil. Hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap UU TNI yang sama.

Sebuah pertemuan tertutup mengenai amandemen UUTNI diadakan di Hotel Fairmont di Jakarta pada tanggal 15 Maret. Pertemuan ini menjadi kontroversial ketika tiga aktivis yang memprotes ketertutupan proses pembahasan dilaporkan ke polisi oleh pihak keamanan hotel, dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Pada tanggal 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia resmi mengadopsi amandemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Protes yang meluas di seluruh Indonesia meletus sebagai tanggapan atas revisi undang-undang yang kontroversial dari pemerintah. Demonstrasi yang dipimpin oleh mahasiswa di berbagai kota ditanggapi dengan keras oleh aparat keamanan, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kekerasan polisi, pengekangan partisipasi masyarakat sipil, dan penurunan kebebasan demokratis di Indonesia.

## Perkembangan internasional

Negara Pasifik Vanuatu, bersama-sama dengan Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall, Nauru, dan Samoa, menyampaikan pernyataan bersama tentang situasi pembela HAM di Tanah Papua dalam dialog interaktif dengan Pelapor Khusus Pembela HAM pada tanggal 6 Maret 2025 selama Pertemuan ke-18 Sesi ke-58 Dewan Hak Asasi Manusia. Christian Solidarity International (CSI) menyampaikan pernyataan lain di Dewan HAM PBB pada tanggal 28 Maret 2025, memperingatkan rencana pemerintah Indonesia untuk memperluas kehadiran militer dan eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua.

Peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation, EUDR) adalah kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa produk-produk yang memasuki pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi sebagai bagian dari target Uni Eropa (UE) untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050. EUDR mengamanatkan perusahaan untuk melakukan uji tuntas yang ketat untuk memverifikasi bahwa rantai pasok mereka bebas dari deforestasi, degradasi hutan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait. Hal ini memiliki implikasi yang besar bagi Tanah Papua dan Indonesia, di mana ekspansi agribisnis dan investasi terkait telah dikaitkan dengan perusakan lingkungan yang meluas dan pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih dari 120 organisasi masyarakat sipil dari Eropa dan Indonesia, termasuk Human Rights Monitor, telah menyerukan kepada Uni Eropa dan Indonesia untuk mengakhiri negosiasi atas usulan Perjanjian Perdagangan Bebas. (FTA) Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Uni Eropa-Indonesia kemungkinan besar akan menimbulkan risiko signifikan terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di kepulauan Indonesia. Uni Eropa sangat tertarik untuk menyelesaikan perjanjian tersebut karena cadangan nikel Indonesia yang sangat besar, yang merupakan komponen utama baterai untuk kendaraan listrik.

# Kasus

## Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa

### Kekerasan berlebihan di Kabupaten Mappi mengakibatkan eksekusi terhadap seorang mahasiswa Papua dan penyiksaan terhadap dua orang lainnya

Pada tanggal 29 Januari 2025, seorang mahasiswa bernama Herlis Pakaimu meninggal setelah dilaporkan disiksa dan ditembak oleh anggota militer di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua. Dua warga Papua lainnya, Steven Agawemu dan Santos Agawemu, diduga disiksa oleh anggota militer yang sama.

Baca lebih lanjut

### Eksekusi di luar hukum terhadap masyarakat adat Papua selama operasi militer di Intan Jaya

Pada tanggal 30 Maret 2025, pasukan militer Indonesia dilaporkan menembak mati Bapak Okto Zanambani, seorang penduduk asli desa Janamba, selama kampanye kontra-pemberontakan yang intensif di distrik Hitadipa dan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Baca lebih lanjut

### Anggota TNI AL dituduh membunuh seorang wanita di Sorong

Pada tanggal 12 Januari 2025, mayat Nyonya Kesya Irene Yola Lestaluhu, seorang perempuan berusia 20 tahun, ditemukan di Pantai Saoka, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pelaku, Agung Suyono Ponidi, seorang anggota TNI Angkatan Laut berusia 23 tahun, mengaku menikam korban berulang kali setelah melakukan hubungan seksual.

Baca lebih lanjut

### Anggota militer menyiksa masyarakat adat Papua di Sorong - Korban meninggal dunia di rumah sakit

Pada tanggal 14 Februari 2025, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara sewenang-wenang menahan dan menyiksa Abner Karet, 23 tahun, di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Baca lebih lanjut

### Anggota militer diduga mengeksekusi warga sipil Papua di Desa Mamba, Intan Jaya

Pada tanggal 27 Februari 2025, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara sewenang-wenang menangkap dan menyiksa Bapak Goliat Sani di Desa Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Baca lebih lanjut

### Dugaan penyiksaan dan pembunuhan terhadap masyarakat adat Papua di Distrik Mebarok: Pembela HAM menyerukan penyelidikan independen segera dilakukan

Aparat militer diduga menyiksa dan membunuh Abral Wandikbo dalam sebuah serangan militer di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan pada 22 Maret 2025. Kerabatnya menemukan mayatnya dua hari kemudian dengan anggota tubuh yang terpotong-potong.
Baca lebih lanjut

## Penyiksaan & perlakuan buruk

### Anggota militer diduga menyiksa dan menahan secara sewenang-wenang pria Papua di Keangga, Kabupaten Puncak

Pada tanggal 5 Februari 2025, aparat militer dilaporkan menyerbu kebun masyarakat di dekat Dusun Keangga. Menurut informasi yang diterima, anggota militer menyergap sekelompok masyarakat adat yang datang ke kebun untuk mengambil makanan.  Para tentara menyiksa U.T. (36) dan T.M. (30), dari Kampung Pogoma dan kemudian menahan mereka selama lebih dari satu minggu.
Baca lebih lanjut

### Oknum polisi diduga menembak petani Papua di Distrik Kapiraya

Pada tanggal 7 Februari 2025, anggota satuan khusus Brimob Polda Papua dilaporkan melepaskan tembakan ke arah seorang petani Papua, Bapak Marten Anouw, di Distrik Kapiraya.
Baca lebih lanjut

### Aparat kepolisian menganiaya pemuda Papua yang mengikuti perayaan di Merauke

Pada tanggal 16 Februari 2025, aparat kepolisian diduga melakukan penyerangan terhadap Bapak Hari Abuy, di depan Pos Polisi Pasar Mangga, Kota Merauke, Provinsi Papua. Aparat kepolisian diduga menyerangnya saat ia melewati pos polisi dengan sekelompok orang. Ia mengalami luka berdarah di bagian kepala dan lutut kanan.
Baca lebih lanjut

**Dua anak perempuan di bawah umur dilecehkan secara seksual saat ditahan polisi di Kaimana - Oknum polisi ditangkap**

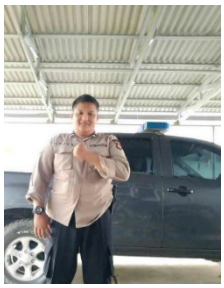

Seorang oknum polisi berinisial EMP diduga melakukan pemerkosaan terhadap dua anak perempuan berusia 13 dan 14 tahun saat berada dalam tahanan setelah kedua korban tertangkap basah mencuri di Kaimana, Provinsi Papua Barat.
Baca lebih lanjut

**Anggota militer menyiksa seorang pria Papua di dalam pos militer di Intan Jaya**

Pada tanggal 4 Maret 2025, Aguni Sondegau, seorang tukang ojek berusia 25 tahun, ditangkap dan disiksa secara sewenang-wenang oleh anggota militer Yonif 509 di Pos Militer Holomama, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.
Baca lebih lanjut

**Polisi menikam seorang pria Papua di Kabupaten Yalimo: Kasus ini menyoroti kurangnya profesionalisme di kalangan polisi di Papua Barat**

Pada tanggal 5 Maret 2025, seorang petugas polisi dilaporkan menikam Bapak Elinus Walianggen selama penahanan di kota Elelim Kabupaten Yalimo.
Baca lebih lanjut

**Anggota militer menyiksa masyarakat adat Papua di Puncak Jaya**

Pada malam hari tanggal 13 Maret 2025, aparat militer dilaporkan menyiksa tiga orang masyarakat adat Papua di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Baca lebih lanjut

**Kebrutalan polisi terhadap mahasiswa Papua di Kabupaten Dogiyai**

Pada tanggal 24 Maret 2025, kekerasan meningkat di Desa Moanemani, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, ketika sekelompok polisi dilaporkan melepaskan tembakan peringatan dan membubarkan kerumunan massa di pasar setempat dengan gas air mata.
Baca lebih lanjut

## Penahanan sewenang-wenang, intimidasi, dan kriminalisasi

**Polisi menangkap dua anak di bawah umur di Dekai tanpa surat perintah**

Anggota Satuan Khusus Brimob Polda Papua dilaporkan menangkap Yakonge Mirin, 14 tahun, dan Ham Salla, 17 tahun, di Jalan Kali Bonto Sosial di kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, saat patroli polisi pada tanggal 3 Januari 2025.
Baca lebih lanjut

**Pembela HAM di Papua Barat dalam pengawasan: Anggota aparat keamanan kembali mengintimidasi aktivis Tineke Rumkabu**

Pada tanggal 26 Januari 2025, aktivis hak asasi manusia Ibu Tineke Rumkabu diintimidasi oleh anggota pasukan keamanan gabungan. Mereka datang menemui Ibu Rumkabu saat beribadah dan kemudian mengunjungi rumahnya di Biak, Provinsi Papua, untuk menginterogasinya.
Baca lebih lanjut

**Penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap lima mahasiswa Papua di Jayapura**

Pada tanggal 8 Februari 2025, lima mahasiswa Papua ditangkap secara sewenang-wenang tanpa surat perintah oleh aparat berpakaian preman di Jayapura. Para mahasiswa tersebut ditahan secara paksa, tangan mereka diikat, dan mata mereka ditutup. Menurut para korban, mereka mengalami penyiksaan dan intimidasi selama penahanan.

Baca lebih lanjut

**Aparat kepolisian mengintimidasi mahasiswa di asrama Jayawijaya di Manokwari**

Pada tanggal 10 Maret 2025, anggota Kepolisian Daerah Papua Barat mengintimidasi mahasiswa di asrama mahasiswa Jayawijaya di Manokwari.

Baca lebih lanjut

**Meningkatnya intimidasi terhadap pembela HAM di Yahukimo**

Pembela hak asasi manusia, Bapak Marcho Pahabol, anggota kelompok solidaritas Front Keadilan untuk Tobias Silak (FJFTS), menjadi sasaran serangkaian intimidasi dan serangan kekerasan di kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan
Baca lebih lanjut

## Kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai

### Program makan siang gratis Presiden Probowo memicu protes di Papua Barat: Aparat kepolisian mengintimidasi, menangkap dan menganiaya murid-murid

Pada tanggal 3 Februari 2025, ratusan siswa di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, melakukan protes terhadap proyek makan siang gratis Prabowo. Dua minggu kemudian, para pelajar di seluruh Papua Barat melakukan demonstrasi damai untuk menolak program tersebut pada tanggal 17 Februari 2025. Protes terjadi di Wamena, Jayapura, Sentani, Nabire, Timika, Yalimo, dan Dogiyai. Aparat keamanan dengan keras menindas aksi protes...

Baca lebih lanjut

### Penindasan terhadap aksi damai yang menuntut keadilan atas pembunuhan Tarina Murib

Pada tanggal 12 Februari 2025, aparat kepolisian mencegah mahasiswa Papua melakukan demonstrasi damai di Kantor DPRD di Nabire, Provinsi Papua Tengah. Para pengunjuk rasa bertujuan untuk menuntut keadilan atas pembunuhan Ibu Tarina Murib...

Baca lebih lanjut

## Pelanggaran lainnya

### Operasi pertambangan ilegal mengancam ekosistem di Provinsi Papua Tengah

Operasi penambangan ilegal telah ditemukan di Desa Ajuda di perbatasan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah dengan Kabupaten Waropen, yang menimbulkan keprihatinan lingkungan dan sosial yang signifikan di kalangan penduduk dan aktivis lingkungan.

Baca lebih lanjut

### Diskriminasi budaya di Katedral Merauke: Polisi dan pastor Katolik melarang penggunaan pakaian adat saat beribadah

Pada tanggal 9 Maret 2025, dua orang asli Papua menghadapi diskriminasi budaya di dalam gereja karena menggunakan pakaian adat di katedral di Merauke.

Baca lebih lanjut

### Masyarakat di Kepulauan Yapen mengajukan gugatan terhadap perusahaan tambang PT SPK atas kerusakan lingkungan

Warga dari tiga desa di Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, telah mengajukan pengaduan resmi ke Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua terhadap PT Sinar Purna Karya (PT SPK).

Baca lebih lanjut

## Tentang Human Rights Monitor

Human Rights Monitor (HRM) adalah proyek nirlaba internasional yang independen yang mempromosikan hak asasi manusia melalui dokumentasi dan advokasi. HRM berbasis di Uni Eropa dan aktif sejak tahun 2022. Kami mencapai visi kami dengan mendokumentasikan pelanggaran; meneliti konteks institusional, sosial dan politik yang memengaruhi perlindungan hak dan perdamaian; dan berbagi kesimpulan dari pekerjaan pemantauan berbasis bukti.

**Kontak:**

Pemantau Hak Asasi Manusia
Friedrich-Ebert-Str. 55
42103 Wuppertal
JERMAN

web: humanrightsmonitor.org
telepon: +49 151 59041934
email: hrm@humanrightsmonitor.org

Konten dalam laporan ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 40 Lisensi Internasional..